

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sistem hukum di Indonesia menganut pluralisme hukum, yaitu berlakunya berbagai sistem hukum secara bersamaan seperti Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat. Dalam konteks pewarisan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dan hak janda sebagai ahli waris, seringkali muncul perbedaan penafsiran dan penerapan antara ketiga sistem hukum tersebut, khususnya antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut KHI dan KUHPerdata; serta (2) perbandingan sistem pembagian hak waris janda dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif** dengan pendekatan **sosio-legal**, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan sosial yang mempelajari penerapannya dalam masyarakat. Bahan hukum primer berupa KHI, KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut **Kompilasi Hukum Islam**, janda termasuk dalam golongan ahli waris *dzawil furudh* yang bagiannya telah ditentukan secara pasti berdasarkan nash. Janda memperoleh bagian **1/4 (seperempat)** apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan **1/8 (seperdelapan)** apabila pewaris meninggalkan anak. Ketentuan ini bersifat mutlak karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta menegaskan asas keadilan proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab keluarga. Sedangkan menurut **KUHPerdata**, janda termasuk dalam **golongan ahli waris pertama** bersama anak-anak pewaris. Pembagiannya tidak bersifat pasti, tetapi bergantung pada jumlah ahli waris, keadaan harta peninggalan, dan ada tidaknya surat wasiat.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa **Hukum Waris Islam** bersifat *teosentris* dan normatif karena bersumber pada ajaran agama, sedangkan **Hukum Waris Perdata** bersifat *antroposentris* dan fleksibel karena didasarkan pada kehendak individu (pewaris) dan asas kebebasan berwasiat. Namun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris, khususnya bagi janda sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum setelah kematian suami.

Kata Kunci: Hukum Waris, Janda, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Analisis Perbandingan

ABSTRACT

This research, entitled “Comparative Analysis of Widow’s Inheritance Rights Distribution According to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code (KUHPerduta)”, is based on the existence of Indonesia’s pluralistic legal system in which several legal orders—Customary Law, Islamic Law, and Western Civil Law—coexist and are applied in parallel. One of the key issues arising from this pluralism is the difference in the interpretation and implementation of inheritance rights, particularly concerning the widow’s position as an heir.

*The objectives of this research are: (1) to examine and analyze the legal position of widows in inheritance distribution according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerduta); and (2) to compare the inheritance distribution systems for widows under both legal frameworks. The study employs a **normative juridical method** combined with a **socio-legal approach**, integrating doctrinal legal analysis with a social perspective. Primary legal materials include the KHI, the Civil Code, and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, while secondary materials consist of legal textbooks, journals, and relevant scholarly writings.*

*The findings indicate that under **the Compilation of Islamic Law (KHI)**, a widow is classified as a *dzawil furudh heir* whose share is explicitly prescribed in the *Qur’an* and *Hadith*. She is entitled to **one-fourth (¼)** of the estate if the deceased husband leaves no children, and **one-eighth (⅛)** if the deceased leaves children. These provisions are definitive and divinely ordained, reflecting a balance between rights and responsibilities within the family structure. Meanwhile, under **the Civil Code (KUHPerduta)**, the widow belongs to the **first class of heirs** together with the *children of the deceased*. The distribution of inheritance in this system is not fixed but depends on the number of heirs, the existence of a will, and the circumstances of the estate.*

*The comparative analysis reveals that **Islamic Inheritance Law** is theocentric and normative, emphasizing divine justice and legal certainty, whereas **Civil Inheritance Law** is anthropocentric and flexible, prioritizing individual autonomy and testamentary freedom. Despite their differences, both legal systems share the same ultimate purpose: to provide justice and legal protection for heirs, particularly widows, ensuring their welfare after the death of their spouse.*

Keywords: Inheritance Law, Widow, Compilation of Islamic Law, Civil Code, Comparative Analysis